

## Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Apakah Efektif Dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD

Dwidya Nitasya<sup>1</sup>, Lilik Handajani<sup>2</sup>, Widia Astuti<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
Indonesia

Corresponding Author: [dwid90dya@gmail.com](mailto:dwid90dya@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine how effective the implementation of local government information systems (SIPD) in supporting financial reporting at OPDs in Mataram City, namely RSUD X. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observations and interviews. The research analysis refers to the UTAUT effectiveness indicators consisting of Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences and Facilitating Conditions. The results of this study indicate that the implementation of SIPD in supporting financial reporting at RSUD X when viewed in terms of indicators of performance expectancy, effort expectancy and facilitating conditions is still less effective because in its implementation SIPD still has many weakness both in terms of system stability and the availability of features needed, while for indicators of social influences SIPD can already be categorized as effective because the implementation of financial report data entry is adapted to user needs.*

**Keywords:** SIPD, Effectiveness, Financial Report, UTAUT.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam mendukung pelaporan keuangan pada OPD di Kota Mataram, yaitu RSUD X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Analisis penelitian mengacu pada indikator efektifitas UTAUT yang terdiri dari Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan Kondisi yang Memfasilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam mendukung pelaporan keuangan di RSUD X jika dilihat dari segi indikator ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan kondisi yang memfasilitasi masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya SIPD masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi kestabilan sistem maupun ketersediaan fitur yang dibutuhkan, sementara untuk indikator faktor sosial SIPD sudah dapat dikategorikan efektif karena dalam pelaksanaan *entry* data laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

**Kata Kunci:** SIPD, Efektivitas, Laporan Keuangan, UTAUT.

### PENDAHULUAN

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah wajib didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Pasal 391-395 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang terdiri dari informasi Pembangunan Daerah, informasi Keuangan Daerah, dan informasi Pemerintah Daerah Lainnya yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014). Wujud nyata dari adanya sistem informasi tersebut ialah mulai diterapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya digantikan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau dikenal dengan sebutan SIPD adalah sistem informasi yang berisikan terkait dengan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pembangunan daerah lainnya yang saling berhubungan dan selanjutnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan Kemendagri mengeluarkan dan mulai menggunakan SIPD ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada daerah dalam melaksanakan fase perencanaan dan persiapan dokumen perencanaan serta aplikasi untuk mengembangkan anggaran khusus dari sistem yang terhubung di seluruh daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Pemerintah Kota Mataram melakukan penilaian daya serap keuangan dan fisik triwulan 1 dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 dan ditemukan kesimpulan bahwa daya serap keuangan maupun fisik APBD pada tahun 2022 masih terbilang rendah, namun lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu hanya 9 persen dari target 20 persen. Sekretaris Daerah Kota Mataram menjelaskan bahwa rendahnya daya serap keuangan OPD disebabkan oleh terlambatnya pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP), hal ini salah satunya dikarenakan oleh adanya kendala dalam penyesuaian penggunaan sistem informasi terdahulu yaitu SIMDA yang digantikan dengan SIPD (Zulfaniorhman, 2022).

Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu OPD di Kota Mataram yaitu RSUD X yang merupakan RSUD Kelas B yang terletak di Kota Mataram, dimana aplikasi SIPD ini mulai digunakan pada akhir tahun 2021 sehingga merupakan teknologi yang masih baru dan masih dalam tahapan uji coba. Oleh karena itu, tentu banyak kendala yang dihadapi saat penerapan aplikasi SIPD ini salah satunya yaitu adanya *down server* atau gangguan yang lumayan sering terjadi sehingga membuat pekerjaan yang berkaitan dengan SIPD menjadi terganggu.

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan SIPD dikemukakan oleh Harahap, (2020) dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan SIPD terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dinyatakan belum efektif karena belum maksimalnya pengoperasian SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektifan penggunaan SIPD adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai tentang cara pengaplikasian SIPD. Penelitian lain yang berkaitan dengan penggunaan SIPD yaitu Tim May et al., (2021) menjelaskan bahwa tingkat efektivitas aplikasi SIPD pada awal penggunaannya belum dapat dikatakan efektif, hal ini karena kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru tentunya cukup besar. Tetapi jika dilihat dari prospek kedepannya, aplikasi SIPD tentunya akan memiliki manfaat yang sangat besar karena semua usulan kegiatan dari OPD telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD yang bersangkutan, hal ini akan

memastikan bahwa tidak ada usulan kegiatan yang sewenang-wenang dan nantinya akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi OPD. Penelitian lain dilakukan oleh Nasution et al., (2021) dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa BPKAD Kota Medan telah menerapkan aplikasi SIPD, namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dikarenakan aplikasi yang masih baru sehingga diharapkan dengan berjalannya waktu SIPD ini akan terus dilakukan upgrade dan perbaikan.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penerapan SIPD yaitu penelitian yang dikemukakan oleh Sahusilawane, (2015) menjelaskan bahwa tingkat efektivitas dari penerapan variabel SIKD menimbulkan dampak negative terhadap penggunaan SIKD, hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan responden untuk menerima adanya teknologi baru. Sedangkan untuk kepercayaan SIKD berdampak secara keseluruhan terhadap variabel efektivitas penggunaan dan kepercayaan SIKD dan akan memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja dari individu. Penelitian lain dilakukan oleh Puspitawati, (2016) menunjukkan bahwa selain sistem, kompetensi dari pengguna juga berpengaruh terhadap tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi. Masalah yang dapat timbul dari kompetensi pengguna adalah adanya pengguna yang tidak memiliki kompetensi karena kurang tingkat pengetahuan dalam penggunaan suatu sistem.

Penelitian ini berusaha untuk melihat efektivitas implementasi SIPD dalam mendukung pelaporan keuangan pada RSUD X. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melakukan analisis terhadap sistem informasi pemerintah daerah yang lebih baru sementara penelitian sebelumnya menggunakan sistem lama yaitu SIMDA, dimana terdapat beberapa perbedaan fitur terhadap kedua sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya akan melihat efektivitas penerapan SIPD tetapi juga akan membahas secara mendalam apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan SIPD serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala yang dihadapi tersebut. Khususnya pada bagian keuangan RSUD X. Pembaruan dalam penelitian ini juga dapat dilihat dari teori yang digunakan, dimana penelitian lain yang sejenis kebanyakan menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), sedangkan penelitian ini justru menggunakan *Unified Theory of Accepted and Use of Technology* (UTAUT). Teori ini merupakan teori penerimaan dan penggunaan teknologi yang dikembangkan oleh Visnawath Venkatesh, dkk pada tahun 2003 (Handayani et al., 2017).

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Mataram yaitu RSUD X. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Goleman et al., (2019) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta sesuai dengan pandangan tertentu. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan efektivitas penerapan SIPD dalam pelaksanaan pelaporan keuangan berdasarkan perspektif pengguna pada bagian keuangan RSUD X.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD X yang memang memiliki peran aktif dalam melakukan input data pelaporan keuangan ke dalam aplikasi SIPD, sedangkan untuk informan pendukung dalam penelitian ini adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan satu Staff Bagian Anggaran yang merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengaplikasian SIPD. Alasan peneliti memilih informan kunci dan informan pendukung tersebut karena informan merupakan orang yang sangat mengetahui secara mendalam bagaimana cara mengaplikasikan SIPD. Penentuan informan ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sebenarnya, selain informan dalam penelitian ini terdapat beberapa orang lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan akses pada aplikasi SIPD, orang yang dapat mengaksesnya antara lain Kasubag Anggaran, Wakil Direktur Bagian Keuangan serta Direktur RSUD X. Namun orang-orang tersebut tidak berperan aktif dalam melakukan input data laporan keuangan pada aplikasi SIPD sehingga tidak dapat menjadi informan dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer, data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan dalam penelitian. Dalam hal ini, data primer dalam penelitian akan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan. Teknik uji kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selanjutnya untuk analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu *data reduction* atau reduksi data, *data display* atau penyajian data, dan *conclusion drawing/verivication* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi (Nugrahani, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dasar teori UTAUT, sehingga analisis tentang efektivitas penerapan SIPD dalam pelaksanaan pelaporan keuangan RSUD X ditinjau dari beberapa aspek utama yaitu Ekpektasi Kinerja (*Performance Expectancy*), Ekspektasi Usaha (*Effort Expectancy*), Faktor Sosial (*Social Influences*), dan Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Conditions*).

Informasi yang diberikan seluruh informan dalam penelitian ini telah dapat dikatakan baik karena informan memiliki pengetahuan luas dan mendalam terkait dengan masalah dalam penelitian. Informan dalam sebuah penelitian dapat dikatakan baik ketika informan tersebut merupakan orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti sehingga informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang valid dan memberikan manfaat yang maksimal dalam analisis dan pengambilan kesimpulan penelitian (Henri, 2018). Dalam penelitian ini, informan kunci dan informan pendukung telah menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan tentang indikator efektivitas penerapan SIPD berdasarkan pada teori UTAUT terkait dengan perspektif pengguna terhadap efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan pelaporan keuangan pada RSUD X.

### 1. Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*)

Ekspektasi kinerja dapat diartikan sebagai kepercayaan yang dimiliki seorang individu bahwa dengan memanfaatkan teknologi maka akan membantu individu tersebut mengalami peningkatan kinerja. Apabila individu percaya bahwa suatu sistem informasi bermanfaat, maka individu tersebut akan cenderung untuk menggunakan teknologi dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, jika individu percaya bahwa suatu teknologi kurang bermanfaat bagi dirinya, maka individu tersebut tidak akan menggunakan teknologi tersebut dalam jangka waktu yang lama (Onibala et al., 2021).

Informan kunci dan informan pendukung menyatakan hal yang sama terkait dengan efektivitas SIPD dimana dari segi ekspektasi kinerja yaitu belum terdapat kesesuaian dengan teori UTAUT, hal ini terlihat dari penerapan SIPD yang dapat dikatakan belum dapat meningkatkan kinerja dan belum dapat dikatakan membantu dalam mempermudah serta mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kendala lainnya yaitu aplikasi ini juga seringkali mengalami error sehingga menghambat pekerjaan yang berkaitan dengan proses input laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Penerimaan dan Staff Bagian Anggaran sebagai berikut:

*“Error dalam pengaplikasian SIPD ini sangat sering terjadi, mungkin dalam satu minggu itu bisa 3 sampai 5 kali error dan biasanya errornya itu saat menjelang siang*

*hari kemungkinan karena banyak yang mengakses. Selain itu, aplikasi SIPD ini juga kan sangat bergantung pada koneksi internet atau wifi, jadi pada saat terjadi mati listrik atau wifi kantor sedang error maka pekerjaan yang berkaitan dengan SIPD menjadi tertunda.” (Bendahara Penerimaan RSUD X, Sabtu 14 Januari 2023).*

*“Kalau untuk bagian anggaran kendala yang paling sering terjadi yaitu server error, jadi kalau pagi dan siang sangat jarang bisa masuk ke aplikasi SIPD. Waktu yang tepat untuk melakukan input ke dalam aplikasi SIPD untuk bagian anggaran sendiri biasanya malam hari atau diluar jam kerja.” (Staff Bagian Anggaran RSUD X, Selasa 17 Januari 2023).*

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran merasa bahwa aplikasi sebelum SIPD yaitu SIMDA lebih sempurna dalam menghasilkan laporan keuangan jika dibandingkan dengan SIPD. Sehingga upaya yang diharapkan oleh pengguna adalah agar pemerintah pusat dapat memperbaiki fitur-fitur yang belum terdapat dalam aplikasi SIPD serta membagi server SIPD berdasarkan provinsi agar mengurangi error yang sangat sering terjadi dalam penggunaan SIPD. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Pengeluaran dan Staff Bagian Anggaran sebagai berikut:

*“Upaya yang dapat dilakukan menurut saya dengan cara melaporkan kendala yang dihadapi ini ke pemerintah pusat, karena wewenang aplikasi ini kan ada di pusat. Mungkin upayanya agar pemerintah pusat bisa memberikan solusi terkait kendalan yang dialami baik itu kendala terkait dengan kesalahan entri agar diberikan fitur edit atau hapus agar kesalahan bisa diatasi.” (Bendahara Pengeluaran RSUD X, Kamis 12 Januari 2023).*

*“Upayanya mungkin menurut saya harus memiliki server sendiri untuk tiap daerah sehingga tidak terjadi error, seperti yang kita tau aplikasi SIPD ini kan diakses oleh seluruh OPD di Indonesia tanpa dibagi servernya per daerah jadi kemungkinan errornya jadi sangat tinggi. Upayanya mungkin bisa dilakukan dengan membagi server SIPD menjadi per provinsi atau kabupaten/kota agar bisa menghindari error.” (Staff Bagian Anggaran RSUD X, Selasa 17 Januari 2023).*

## **2. Ekspektasi Usaha (*Effort Expectancy*)**

Ekspektasi usaha dapat diartikan sebagai kemudahan yang didapatkan dalam pengaplikasian sistem informasi, jadi semakin mudah suatu teknologi digunakan maka akan semakin menimbulkan perasaan nyaman saat menggunakan teknologi tersebut dan begitupula sebaliknya apabila suatu sistem dirasa sulit untuk digunakan maka terdapat perasaan tidak

nyaman pada saat menggunakan teknologi dan menyebabkan kurang atau hilangnya minat dalam menggunakan teknologi (Nurfitriyani, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa ekspektasi usaha terkait dengan perspektif pengguna terhadap efektivitas penerapan SIPD belum sesuai dengan teori UTAUT. Hal ini dikarenakan secara umum penggunaan dari sistem belum dapat dikatakan membantu mempermudah serta mempercepat pekerjaan pengguna secara optimal, dimana pernyataan tersebut didukung oleh fitur-fitur dalam SIPD yang belum sesempurna dan selengkap fitur-fitur pada aplikasi sebelumnya, seperti fitur laporan BLUD serta fitur mengedit serta menghapus apabila terjadi ketidaksengajaan dalam pengentrian.

Karena ketiadaan fitur untuk mengedit serta menghapus data apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja dalam pengentrian SIPD, maka hal yang dilakukan oleh pengguna adalah menghubungi BKD selaku operator SIPD untuk wilayah Kota Mataram. Dari laporan tersebut BKD akan menyampaikan keluhan yang dialami pengguna kepada pemerintah pusat (Kemendagri), namun laporan tersebut biasanya tidak mendapat balasan yang berarti sehingga pengguna biasanya memiliki inisiatif untuk membuat laporan keuangan manual sebagai *crosscheck* apabila terjadi ketidaksengajaan dalam pengentrian. hal ini tentu saja membuat pengguna menjadi terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ketiadaan fitur untuk membuat laporan keuangan BLUD juga menjadi salah satu kelemahan yang sangat menyusahakan pengguna pada RSUD X, hal ini karena RSUD X merupakan RSUD yang memegang dua anggaran yaitu anggaran dari APBD dan anggaran dari BLUD. Ketidadaan fitur BLUD mengharuskan pengguna untuk membuat tiga laporan keuangan yang berbeda, dimana untuk APBD akan dilakukan menggunakan aplikasi SIPD, BLUD akan dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Setelah kedua laporan tersebut selesai, maka pengguna akan menggabungkan laporan tersebut secara manual. Hal ini membuat pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna justru semakin bertambah banyak sehingga tidak dapat dikatakan mempermudah serta mempercepat pekerjaan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD X sebagai berikut:

*“Karna kita memegang 2 anggaran yaitu anggaran APBD dan BLUD jadi kita harus membuat 2 laporan keuangan, untuk laporan keuangan APBD itu sudah terakomodir dengan SIPD namun untuk laporan BLUD itu belum terakomodir. Dalam hal ini kita membuat 2 laporan keuangan yang berbeda yaitu satu menggunakan SIPD dan satu lagi untuk BLUD menggunakan manual. Jadi menurut saya adanya aplikasi SIPD ini belum bisa dikatakan membantu mempermudah serta mempercepat pekerjaan untuk yang*

*BLUD. Selain itu, aplikasi SIPD ini belum ada fitur edit atau hapus kalau kita salah entri, jadi kesalahan yang kita tidak sengaja lakukan akan kita laporkan ke pemegang user yang kemudian diterukan kepada pemerintah pusat.” ( Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD X, Sabtu 14 Januari 2023).*

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya aplikasi SIPD ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna, salah satunya yaitu aplikasi SIPD ini dapat menjadi backup atau tempat untuk menyimpan bukti setoran dan rekening koran, selain itu dengan adanya aplikasi ini juga dapat membantu bendahara penerimaan dalam melakukan penyusunan laporan akhir.

*“SIPD ini tentunya memberikan manfaat bagi saya walaupun manfaat yang diberikan belum optimal, SIPD ini bisa membantu saya sebagai tempat untuk menyimpan bukti transaksi baik itu berupa kwitansi maupun berupa rekening koran yang sewaktu-waktu pasti akan saya butuhkan kembali apabila terjadi pemeriksaan atau audit. Selain itu, informasi yang dihasilkan SIPD ini juga memberikan manfaat bagi saya dan memudahkan saya dalam menyusun laporan akhir.” (Bendahara Penerimaan RSUD X, Rabu 11 Januari 2023).*

### **3. Faktor Sosial (*Social Influences*)**

Faktor sosial dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang individu merasakan bahwa penting bagi orang lain untuk percaya bahwa individu tersebut harus mengaplikasikan sistem atau dengan kata lain keinginan seseorang untuk mengaplikasikan suatu sistem karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya (Hartati, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa ekspektasi usaha terkait perspektif pengguna terhadap efektivitas SIPD telah sesuai dengan teori UTAUT. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya aplikasi SIPD ini dengan baik oleh seluruh pegawai di RSUD X pada umumnya dan informan penelitian pada khususnya. Walaupun pada awal diberlakukannya SIPD tentu banyak sekali terdapat penolakan dari hampir seluruh pegawai RSUD X karena pegawai beranggapan bahwa sistem informasi yang diberlakukan terus mengalami pergantian sehingga membutuhkan penyesuaian serta pelatihan. Namun adanya SIPD tetap diterima karena dapat dikatakan sebagai suatu keharusan dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

*“SIPD memang diwajibkan oleh Kemendagri untuk digunakan oleh seluruh OPD di Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia tanpa terkecuali.” (Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD X, Sabtu 14 Januari 2023).*

Periode dilakukannya input pelaporan pada aplikasi SIPD ini sendiri bergantung pada kebutuhan terhadap laporan keuangan tersebut, seperti pada saat bendahara pengeluaran ingin mencairkan dana untuk mencairkan gaji pegawai kontrak maka pada saat itulah bendahara pengeluaran melakukan input data pada aplikasi SIPD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

*“Periode penginputan data kalau untuk saya yaitu pada saat saya membutuhkan data tersebut, misalnya ketika saya ingin membuat SPP-SPM gaji maka saya akan mengetri data pada saat saya membutuhkan SPP-SPM gaji itu.” (Bendahara Pengeluaran RSUD X, Kamis 12 Januari 2023).*

Selanjutnya untuk cara melakukan input data pada aplikasi SIPD juga sesuai dengan kebutuhan pengguna, contohnya pada bagian penerimaan dibutuhkan kwitansi dan rekening koran sebelum input data laporan keuangan dimulai. Sedangkan untuk bagian anggaran, input data laporan keuangan dilakukan apabila telah dilakukan rapat untuk membuat standar satuan harga dan apabila standar satuan harga tersebut telah diinput oleh BKD ke aplikasi SIPD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Penerimaan dan Staff Bagian Anggaran sebagai berikut:

*“Untuk cara input pada bagian penerimaan khususnya yang saya lakukan adalah pertama saya harus menyiapkan bukti dokumen seperti kwitansi dan rekening koran, kemudian melakukan scan berkas tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk PDF, selanjutnya melakukan entri data atau proses input dan kemudian melakukan upload berkas pada setiap proses itu.” (Bendahara Penerimaan RSUD X, Rabu 11 Januari 2023).*

*“Kalo di bagian anggaran input SIPD itu dilakukan setelah selesai dilakukan rapat untuk menentukan berapa anggaran yang diterima OPD, setelah anggaran diterima masing-masing OPD mulai menyusun rencana anggarannya seperti apa, kemudian dibuat standar satuan harga dan program kegiatannya. Jika standar satuan harga sudah ada akan dikirimkan ke bagian asset Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk dimasukkan ke sistem SIPD. Setelah satuan standar harga masuk ke dalam sistem SIPD, maka baru bisa dilakukan input atau entry data.” (Staff Bagian Anggaran RSUD X, Selasa 17 Januari 2023).*

#### 4. Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Conditions*)

Kondisi yang memfasilitasi dapat diartikan sebagai sejauh mana individu percaya bahwa fasilitas sistem dapat memberikan dukungan terhadap penggunaan sistem atau dengan kata lain apabila seorang individu memiliki tingkat fasilitas yang rendah maka niat menggunakan teknologi juga akan cenderung rendah, sebaliknya jika tingkat fasilitas seorang individu tinggi maka niat untuk menggunakan teknologi juga akan tinggi (Onibala et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa kondisi yang memfasilitasi terkait perspektif pengguna terhadap efektivitas SIPD belum sesuai dengan teori UTAUT. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya error dalam pengaplikasian SIPD serta beberapa fitur seperti laporan BLUD dan fitur mengedit serta menghapus apabila terjadi kesalahan pengertian dalam SIPD. Untuk melakukan input data dalam aplikasi SIPD tentunya perlu disiapkan hal-hal yang bergantung pada kegunaan data yang akan diinput.

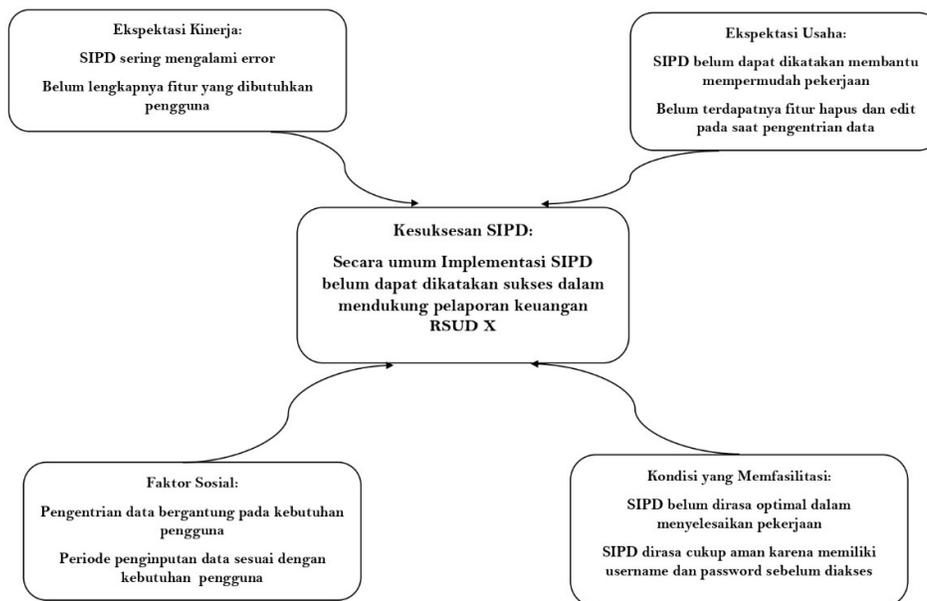
Selanjutnya untuk keamanan dalam penggunaan SIPD dapat dikatakan aman untuk digunakan karena sebelum memasuki laman SIPD pengguna akan memasukkan username dan password yang berbeda per individu, hal ini tentunya akan menjamin kerahasiaan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD X sebagai berikut:

*“Selalu dibutuhkan username dan password untuk menjaga kerahasiaan data yang kami miliki.”* (Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD X, Sabtu 14 Januari 2023).

Terakhir untuk kesesuaian antara sumber daya waktu dan tenaga kerja yang tersedia, untuk bagian penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sudah efektif. Sementara untuk bagian anggaran, SIPD dirasakan belum dimanfaatkan secara maksimal karena staff yang bekerja pada bagian anggaran hanya satu orang saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staff Bagian Anggaran sebagai berikut:

*“Kalo di bagian anggaran, karena staff bagian anggaran ini saya sendiri jadi untuk tenaga kerja belum bisa dikatakan efektif. Namun, untuk sumber saya waktu yang diberikan menurut saya sudah cukup efektif tetapi kendala server yang membuat waktu yang diberikan ini menjadi kurang efektif.”* (Staff Bagian Anggaran RSUD X, Selasa 17 Januari 2023).

## Ringkasan Hasil Penelitian



**Gambar 1. Indikator UTAUT Terhadap Kesuksesan Penerapan SIPD.**

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Indikator tingkat efektivitas berdasar pada teori UTAUT pada point Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*), Ekpektasi Usaha (*Effort Expectancy*) dan Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) menyatakan hal yang sama yaitu SIPD dirasa belum efektif karena belum dapat meningkatkan kinerja serta belum dapat membantu mempermudah serta mempercepat penyelesaian pekerjaan. ketidakefektifan ini dikarenakan SIPD terlalu sering mengalami error serta fitur yang terdapat didalamnya belum selengkap aplikasi yang digunakan sebelumnya. Namun, pengguna tidak menyangkal bahwa adanya aplikasi ini juga memberikan manfaat kepada pengguna walaupun manfaat yang diberikan belum optimal. Selain itu keamanan dalam aplikasi ini juga terbilang sangat mumpuni karena sudah dilengkapi dengan *username* dan *password* sebelum memasuki laman aplikasi sehingga kerahasiaan data dapat terjaga.

Indikator Faktor Sosial (*Social Influences*) merupakan satu-satunya indikator yang dapat dikatakan sesuai karena SIPD merupakan aplikasi yang wajib digunakan oleh RSUD X selaku OPD sehingga keberadaan SIPD diterima baik oleh seluruh pegawai walaupun pada

awal penerapannya tentu terdapat banyak penolakan dari pegawai karena harus terus menyesuaikan diri dengan sistem informasi baru.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup dalam penelitian yang hanya bersumber pada Bagian Keuangan RSUD X dan kurangnya bukti berupa dokumen karena terdapat unsur privasi. Saran dalam penelitian ini adalah untuk pemerintah pusat (Kemendagri) diharapkan dapat melakukan pembaruan terhadap fitur-fitur yang belum tersedia pada aplikasi SIPD serta melakukan pembagian server menjadi berdasarkan provinsi agar dapat mengurangi error, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan SIPD tidak hanya pada Bagian Keuangan RSUD X tetapi juga bisa melakukan penelitian pada bagian atau instansi lain yang menggunakan SIPD seperti BKD atau Badan Keuangan Daerah. Selain itu agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan sumber data dari dokumen penting lainnya sehingga bisa menambah bukti atau memvalidasi wawancara seperti dokumen SPP-SPM gaji dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 85 1 (2014).
- Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2019). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–13.
- Handayani, T., & Sudiana, S. (2017). Analisis Penerapan Model Utaut (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) Terhadap Perilaku Pengguna Sistem Informasi (Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik Pada Sttnas Yogyakarta). *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*, 7(2), 165. <https://doi.org/10.28989/angkasa.v7i2.159>
- Harahap, muhammad zaky. (2020). *Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan*.
- Hartati, E. (2017). Analisis Sistem Penerapan E-Learning dengan Menggunakan Metode UTAUT ( Unified Theory of Acceptanced Use of Technology ) ( Study Kasus : STMIK XYZ ). *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 8(1), 13–18.
- Henri. (2018). Analisis Pencegahan Perkawinan Usia Dini. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 4, 38–43.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Nasution, M. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). *Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ( Bpkad ) Kota Medan*. 9, 110–116.
- Nugrahani, F. (2014). *dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 1(1), 305.
- Nurfitriyani, S. J. (2020). *Mengenal UTAUT2 sebagai Salah Satu Technology Acceptance*. Binus. <https://sis.binus.ac.id/2020/07/20/mengenal-utaut2-sebagai-salah-satu->

technology-acceptance/

- Onibala, A. A., Rindengan, Y., & Lumenta, A. S. (2021). Analisis Penerapan Model UTAUT2 Terhadap E-Kinerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi utara. *E-Journal Teknik Informatika*, 2, 1–13.
- Puspitawati, L. (2016). The analysis of effectiveness measurement in Accounting Information Systems through competence factor of information system user (Research on higher education in Bandung). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(2), 815–841.
- Sahusilawane, W. (2015). The Impact of Effectiveness to Use and Trust of Local Financial and Information System (SIKD) To Individual Performance in Southeast Moluccas. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 960–965. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.127>
- Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins, and P. A. B. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. 21(1996), 6.
- Zulfaniorohman. (2022). *Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Mataram Belum Cair*. Dkliknews.Com. <https://www.dkliknews.com/seputar-ntb/amp/pr-3482928792/duh-tambahan-penghasilan-pegawai-pemerintah-kota-mataram-belum-cair>